



KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Bangka Pos
- Babel Pos
- Radar Bangka
- Babel News
- Rakyat Pos
- Lainnya :

Tanggal:

Bulan:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

2
0
1
9

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Satu Sekolah Kelola Rp 4 Miliar

■ Gubernur: Jangan Anti Pemeriksaan BPK



GUBERNUR Babel Erzaldi Rosman mengumpulkan kepala SMA/SMK se-Babel guna membahas penatausahaan keuangan di lingkungan dinas pendidikan, di rumah dinas Gubernur Babel, Kamis (2/5).

PANGKALPINANG, BANGKA POS - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman meminta kepala sekolah tidak alergi terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, pemeriksaan tersebut bertujuan untuk perbaikan sistem keuangan yang dikelola sekolah.

Hal itu disampaikan Erzaldi saat mengumpulkan kepala SMA/SMK se-Provinsi Babel guna membahas penatausahaan keuangan di lingkungan dinas pendidikan, di rumah dinas Gubernur Babel, Kamis (2/5).

Ia menyebut, tahun 2019 merupakan tahun pertama satuan pendidikan turut diperiksa BPK. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, maupun iuran pelaksanaan pendidikan (IPP) atau uang Komite.

diminta bersiap diri. "Mulailah *link* ke *simda* (sistem informasi manajemen daerah), begitu ketika *di-input*, buat laporan, jangan main tunggu-tunggu. Duit itu keluar langsung kerjakan, enggak ada lagi *cash bon*," ujar Erzaldi seraya meminta pelaporan keuangan tersebut menggunakan sistem

baru karena sesuai dengan tuntutan zaman.

Kepala SMKN 1 Simpang Teritip, Asdiah, mengatakan, kendala yang dihadapi pihaknya adalah kekurangan pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengelola keuangan daerah. Bahkan, ada satu guru yang menjabat tiga jabatan sekaligus yakni bendahara APBN, APBD, dan IPP.

"Jangankan mengurus keuangan, guru kami juga kekurangan. Kondisi sekolah baru dengan menjalankan keuangan yang sangat luar biasa berat," kata Asdiah.

"Perkembangan bukan tidak siap, tetapi tenaga enggak cukup. Ini guru saja masih kurang, ada satu orang memegang tiga jabatan. Itu dia lah bendahara APBN, APBD, IPP, karena syarat bendahara kan harus PNS," lanjutnya. (o2)

"Saya minta jangan anti pemeriksaan BPK, *enjoy bai* (saja). Mereka (BPK) bukan cari kesalahan tetapi perbaikan," kata Erzaldi. "Kita diperiksa BPK bukan berarti kita salah. Ini baru pertama kali di audit BPK, jangan lemah semangat," ujarnya.

Dia mengakui pemeriksaan tersebut tidak seperti sebelumnya. Dengan demikian, kemampuan pengelola keuangan dan kepala sekolah memang perlu ditingkatkan. Kepala sekolah harus tahu tentang keuangan, pendidikan, dan lingkungan.

Lebih lanjut, Erzaldi menyebutkan, berdasarkan data BPK, ada Rp 400 miliar dana yang dikelola pihak sekolah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah perlu benar-benar dipahami.

"Sekarang kita *upgrade* (tingkatkan) kemampuan bendahara. Kalau kata BPK, satu ada Rp 400 miliar yang dikelola sekolah, kalau dibagi 86 sekolah, artinya setiap sekolah mengelola sekitar Rp 4 miliar," tuturnya.

Erzaldi berharap nantinya penatausahaan keuangan sekolah makin baik dan sesuai aturan. Dengan demikian, satuan pendidikan pun bisa dikelola dengan baik. Atas dasar itu, pihak sekolah